

RINGKASAN

NURUL CAHYA NOVIATI, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Akibat Hukum Pemalsuan Akta Otentik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Kualitas Kekuatan Pembuktian Akta Dan Sanksi Kode Etik Ppat, Komisi Pembimbing: Ketua Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. dan Anggota Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

Pembuktian perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dalam perspektif pembuktian, akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, lengkap, dan mengikat, yang mengindikasikan bahwa kebenaran dari informasi yang tercatat dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim. Namun demikian, tidak jarang PPAT sebagai Pejabat Umum berurusan dengan proses hukum pidana seperti dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka berkaitan dengan isi akta yang dibuat olehnya. Salah satu kasus pemalsuan akta otentik yang terjadi adalah pada Pengadilan Negeri Cilacap Perkara Nomor 44/Pid.B/2021/PN Clp. Tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Terdakwa SA selaku PPAT telah didakwa melakukan pemalsuan surat berupa akta hibah. Dengan melihat hal tersebut muncul permasalahan tentang bagaimana akibat hukum dari akta otentik palsu yang dibuat oleh PPAT terhadap kualitas kekuatan pembuktian dan akibat hukum bagi PPAT yang melakukan pemalsuan akta otentik dari perspektif Kode Etik PPAT.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari akta otentik palsu yang dibuat oleh PPAT terhadap kualitas kekuatan pembuktian atas akta otentik menjadi batal demi hukum. Kemudian akibat hukum bagi PPAT pelaku pemalsuan akta otentik dari perspektif penerapan sanksi Kode Etik PPAT dapat dilakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi oleh Majelis Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan Majelis Kehormatan Pusat pada tingkat banding sesuai kewenangan masing masing sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan 10 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017.

Kata kunci: Pemalsuan, kekuatan pembuktian, kode etik PPAT.

SUMMARY

NURUL CAHYA NOVIATI, Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, *Legal Consequences of Forgery of Authentic Deeds by Officials Making Land Deeds on the Quality of Proof of Deeds and Sanctions of the Ppat Code of Ethics, Supervisory Commission: Chair Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. and Member Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.*

Proving a case is to determine the actual legal relationship between the parties involved in the case. From an evidentiary perspective, an authentic deed is a perfect, complete and binding means of proof, which indicates that the truth of the information recorded in the deed must be recognized by the judge. However, it is not uncommon for PPAT as a Public Official to deal with criminal legal processes such as being questioned as a witness or suspect regarding the contents of deeds he or she has made. One of the cases of forgery of authentic deeds that occurred was at the Cilacap District Court, Case Number 44/Pid.B/2021/PN Clp. The crime of forgery of authentic deeds committed by Defendant SA as PPAT has been charged with forgery of documents in the form of grant deeds. By seeing this, the problem arises regarding the legal consequences of fake authentic deeds made by PPAT on the quality of the strength of evidence and the legal consequences for PPATs who falsify authentic deeds from the perspective of the PPAT Code of Ethics.

This research is normative legal research, with statutory, conceptual and case approaches. The data source used is secondary data. Data collection was carried out through literature study. Presentation of data in the form of systematically arranged descriptions. The data analysis method is normatively qualitative.

The results of this research explain that the legal consequences of fake authentic deeds made by PPAT on the quality of the evidentiary power of authentic deeds are null and void. Then the legal consequences for PPAT perpetrators of falsifying authentic deeds from the perspective of implementing sanctions from the PPAT Code of Ethics can be examined and imposed sanctions by the Regional Honorary Council at the first level and the Central Honorary Council at the appeal level in accordance with their respective authorities as regulated in Article 8, Article 9 and 10 Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 112/KEP-4.1/IV/2017.

Keywords: Falsification, strength of evidence, PPAT code of ethics.